



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN KENDALA
PENANGANANNYA MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk diuji guna melengkapi tugas-tugas
Dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan
Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

ISMIYANTO
NPM : 211003742018971

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DAN KENDALA
PENANGANANNYA MELALU MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ISMIYANTO
NPM 211003742018971

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Sri setiawati, S.H, M.Hum
NUPTK : 2453741642230070

Anggota,

Dr. RR. Widyarini Indriasti, S.H.M.Hum
NUPTK : 4145740641230070

Anggota,

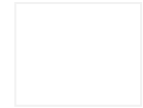
Dr. Hadi Karyono, S.H.M.Hum
NUPTK : 7034742643130080

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiono, S.H., M.Hum.
NUPTK : 2757741642130070

SEMARANG
2025



ABSTRAK

Tenaga kerja migran Indonesia memiliki hak atas perlindungan yang tetap berlaku meskipun mereka bekerja di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun demikian, meskipun hak atas penghidupan yang layak dan perlindungan kerja telah dijamin secara filosofis dan konstitusional, dalam praktiknya banyak tenaga kerja migran Indonesia yang menghadapi kerentanan tinggi terhadap eksploitasi, kekerasan, hingga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dapat menggambarkan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan kendala dalam penanganannya melalui media sosial. Dalam konteks hukum positif, UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPPO menjadi dasar utama dalam menindak pelaku dan melindungi korban perdagangan orang. Namun, undang-undang ini belum mengatur secara eksplisit ruang digital sebagai bagian dari locus delicti, sehingga belum mampu menjangkau modus TPPO berbasis media sosial secara maksimal. 2) Perlindungan hukum terhadap pekerja migran dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berbasis digital menjadi tantangan baru dalam sistem hukum Indonesia. Modus perekrutan dan eksploitasi melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, TikTok, dan Instagram semakin marak, dengan menasar kelompok rentan seperti perempuan dan calon pekerja migran dari desa atau kota kecil. Sinergi antara hukum, teknologi, dan edukasi publik harus dibangun agar perlindungan hukum terhadap pekerja migran tidak hanya normatif, tetapi benar-benar hadir di era digital yang semakin kompleks dan tanpa batas, Negara harus adaptif, responsif, dan berpihak pada korban..

Kata kunci :Tindak Pidana, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Imigran. Hak Asasi Manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	10
C. Perumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	33
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	47
BAB III : METODE PENELITIAN	60

A. Metode Pendekatan	60
B. Spesifikasi Penelitian	62
C. Sumber Data	63
D. Metode Pengumpulan Data	64
E. Metode Analisis Data	65
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	66
A. Perlindungan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia.....	66
B. Kendala Dan Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap TPPO Yang Dilakukan Dengan Modus Operandi Melalui Media Sosial.....	108
BAB V : PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140